

Konsep Intersubyektivitas dalam Perspektif Pancasila

Oleh : Fahmi Muqoddas



Fahmi Muqoddas, lahir di Yogyakarta 29 Januari 1945 Alumni Fak. Filsafat UGM dan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Dosen pada Fak. Ushuluddin IAIN SUKA bidang Filsafat dan Dosen di UII sejak 1976 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fak. Teknik Tekstil UII Tahun 1977 - 1980. Sekarang sedang menempuh S2 UGM bidang studi ilmu Filsafat

Pendahuluan

Kebudayaan manusia dewasa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Ada yang mencirikan sebagai kebudayaan "sosio teknik" yaitu kebudayaan dimana ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan manusia mengendalikan tidak hanya alam, tetapi juga institusi-institusi sosial, seperti ekonomi, pendidikan, ilmu dan penelitian serta politik (Sastrapratedja, 1991).

Namun demikian kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) itu memunculkan paradoks-paradoks baru. Disatu pihak, teknologi telah mampu membuktikan bahwa ia adalah suatu kekuatan, suatu "kratos" yang bersifat produktif dan konstruktif. Kemajuan IPTEK telah menjadi "mitos" yang memberikan

"epos" terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Kenyataan menunjukkan bahwa kita tidak memungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah banyak membawa manfaat bagi kemanusiaan. Sebaliknya, kemampuan itu sendiri seringkali membuat pola-pola baru yang tidak melekat pada masyarakat sebagai induk yang memiliki daya rekat bagi warganya. Akibatnya, IPTEK yang dikembangkan untuk mengantisipasi sejumlah manusia malah menggoncangkan tata hidup dan tata nilai yang semula diunggulkan. Perkembangan IPTEK ternyata telah mampu merenggangkan dan meruntuhkan nilai-nilai moralitas serta merobah pola hidup masyarakat.

Kemajuan di bidang IPTEK serta globalisasi informasi ternyata menggeser norma-norma tradisional yang sudah mengakar di masyarakat bahkan norma-

norma agama. Setiap produk IPTEK yang baru menurut Iskandar Alisyahbana, selalu membawa bibit-bibit persoalan baru dengan dampak yang merugikan atau bahkan malapetaka yang mengancam kehidupan di bumi ini. (Iskandar Alisyahbana, 1988).

Persaingan makin ketat dan keras dalam setiap bidang kehidupan dan profesi, bahkan cenderung memikirkan kebutuhan diri sendiri, golongan dan kelompoknya. Hubungan antar individu tidak lagi dilandasi oleh suatu kesadaran untuk wajib tolong menolong, tetapi didasari oleh suatu pertimbangan apakah menguntungkan atau tidak secara materi. Hubungan semacam itu mudah menimbulkan ketegangan dan kerenggangan karena tidak berangkat dari suatu pemahaman secara utuh terhadap orang lain dalam konteks ruang dan waktu yang tentunya sangat bervariasi.

Pada umumnya orang menginginkan hidup tenteram, damai, rukun tanpa ada tekanan dalam masyarakat. Kita tidak menginginkan penindasan dan permusuhan antar manusia. Bagaimana cara menciptakan masyarakat seperti itu?. Kiranya perlu dicari lebih dahulu dasar hubungan antara manusia dan bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya. Moralitas apakah yang dijadikan dasar bagi hubungan sosial itu.

Dalam hubungan antar manusia kita masih melihat sikap perlakuan yang menempatkan manusia sebagai barang yang dimanfaatkan menurut kehendak kita. Dengan demikian berarti memerosotkan manusia dari kedudukannya sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan. Padahal secara ideal kita harus memperlakukan manusia lain, sebagai "Engkau" bukan sebagai "Barang". Dalam hubungan "Aku-Engkau"

kita dapat merasakan suasana terbuka, saling menerima, saling melengkapi, saling mengingatkan, bahkan dengan bebas saling mempengaruhi satu sama lain dalam suasana dialog.

Pancasila yang merupakan arketipe induk bangsa Indonesia (Dibyasuharda, 1990), berfungsi sebagai kultur normatif. Oleh karena itu, Pancasila sekurang-kurangnya harus menjadi asas metafisis yang melandasi hubungan intersubjektivitas (hubungan "Aku-Engkau") dalam sosialitas ke-Indonesiaan.

Sebagai suatu sistem filsafat yang dibangun dari asumsi yang menghargai individu dan sosialitas, Pancasila akan memenuhi sebagai suatu prinsip dasar hubungan "Aku-Engkau". Tulisan ini akan mencoba merumuskan prinsip hubungan intersubjektivitas itu dalam perspektif Pancasila dengan merujuk pada pemikiran Martin Buber dan Gabriel Marcel sebagai dasar memahami hubungan "Aku-Engkau" secara filosofis.

Pandangan Tentang Hakekat Manusia

Pandangan tentang hakekat manusia mempunyai corak yang beraneka ragam. Setiap filsuf mempunyai pandangan yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, latar belakang kebudayaan serta cara berpikirnya. Mereka tidak hanya berbeda satu sama lain, bahkan acapkali saling bertentangan (Leahy, 1989). Perbedaan pandangan tentang hakekat manusia akan mengakibatkan perbedaan pandangan hubungan antar manusia. Hobbes mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya bersaing, agresif, antisosial dan bersifat kebinatangan, homo homini lupus (Titus, 1984). Penaklukan satu sama lain

merupakan inti pandangan Hobbes tentang hubungan antar manusia. Mirip pandangan Hobbes adalah pandangan Nietzsche, kendati dengan titik pijak yang berbeda. Jika Hobbes mendasarkan nafsu penaklukan pada sifat kebinatangan yang agresif, maka Nietzsche mendasarkan pada kehendak untuk berkuasa, *der Wille zur Macht* (Poespowardojo, 1985).

Di samping penaklukan, ada pula filsuf yang memandang hubungan antar manusia bernafaskan kecurigaan dan kejengkelan. Sartre misalnya, "Orang lain adalah kematian yang tersembunyi pada kemungkinan-kemungkinanku" ujar Sartre. Lebih tajam lagi dia menandakan: "Asal mula kejatuhanku adalah eksistensi orang lain". Pendek kata, kehadiran orang lain bagi Sartre adalah faktisitas pembatas kebebasan diri yang tak terelakkan. (Fuad Hasan, 1979).

Confusius mendasarkan pandangannya pada prinsip timbal balik dalam hubungan antar manusia. Ia pernah mendefinisikan keadaan timbal balik sebagai "tidak mengerjakan hal-hal terhadap orang lain, yang kita sendiri tidak menginginkan mereka mengerjakan hal-hal tersebut terhadap kita sendiri". Gagasan yang sama dinyatakan lebih positif sebagai berikut: "Manusia bajik dalam arti kata yang sebenarnya, apabila hendak mengukuhkan kedudukannya, akan berusaha mengukuhkan kedudukan orang lain; Apabila hendak memperoleh hasil, akan berusaha membantu orang lain agar orang tersebut berhasil. Jalan kebajikan sejati ialah menemukan prinsip perilaku terhadap orang-orang lain dalam keinginan hati kita sendiri (Creel, 1989). Confusius mengajarkan "Jen" (perikemanusiaan),

ujudnya adalah sikap kasih sayang antara manusia yang mempunyai dua segi, yaitu:

1. Chung (positif): mengandung makna "Apa yang Engkau suka orang lain berbuat kepadamu, maka berbuatlah kepadanya/orang lain".
2. Shu (negatif) mengandung makna "Apa yang Engkau tidak suka orang lain berbuat kepadamu, maka janganlah engkau berbuat seperti itu kepadanya/orang lain" (Tjie Tjay - Ing, tt).

Dalam khasanah pemikiran Timur yang lain, India, kita kenal ungkapan *Tat Twam Asi*. Konsep dasar ungkapan ini tidak sekedar timbal balik sebagaimana dicanangkan Confisius, melainkan mengandalkan "keluluhan" antar subyek, antar *Atman* dan *Brahman*, suatu konsepsi teologis yang diderivasikan ke kehidupan kemanusiaan. (Harun Hadiwijono, 1979).

Hakekat manusia menurut Notonagoro sebagai arti bersifat pribadi perseorangan atau individu dan juga bersifat pribadi hidup bersama, pribadi bermasyarakat atau makhluk sosial. Disamping hidup sendiri, manusia hidupnya selalu berhubungan dengan manusia lain, tergantung daripada manusia lain, sebelum dilahirkan, sesudah dilahirkan, sebagai bayi, sebagai kanak-kanak, sebagai anak remaja, sebagai orang dewasa, sebagai orang lanjut usianya, setelah meninggal dunia, terus menerus membutuhkan orang lain, maka sungguh menjadi hakekatnya untuk hidup bersama, untuk bermasyarakat. Hakekat manusia merupakan keutuhan keseluruhan diri, dengan susunannya atas raga dan jiwa dalam kedua tunggalan, maka dengan sendirinya sebagai bawaannya yang semestinya ialah bahwa baik sumber-sumber kemampuan jiwanya akal-rasa-

kehendak maupun sifat-sifat hakekatnya sebagai individu dan pribadi bermasyarakat atau makhluk sosial serta hakekatnya pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan masing-masing, satu sama lainnya, mewujudkan pula ketunggalan yang mutlak hakekat. (Notonagoro, 1980).

Ketika berbicara tentang "Dinamika Manusia" Driyakara mengatakan bahwa dinamika manusia itu adalah untuk kesempurnaan diri, jadi arahnya: Ke-paripurna-an diri. Di samping itu juga harus dikatakan bahwa dinamika kita itu adalah dinamika ke arah penyempurnaan sesama. Manusia tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan menyempurnakan dan bersama-sama orang sesamanya. Sebab itu dinamikanya tidak bisa tidak ke arah kesempurnaan sesamanya juga. Hal ini berarti bahwa manusia itu hanya bisa berkembang dengan memperkembangkan macam-macam kesatuan, mulai dari keluarga sampai masyarakat besar. Karena dinamika manusia itu pada dasarnya mengarahkan diri ke sesama, jadi ke masyarakat, maka pada dasarnya antara masyarakat dan pribadi berarti menyempurnakan diri sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa manusia itu ya persona, ya individu. Dia adalah persona-individu. Dia individu karena kejasmaniannya. Dan kejasmanian adalah batas dan rintangan kesosialan, meskipun juga menjadi medianya. Karena manusia itu individu dan individualitas membatasi dan merintang sosialitas, maka antara masyarakat dan manusia individual ada pertentangan. Maka manusia sebagai persona harus berjuang terus untuk mengalahkannya individualitasnya. Tetapi individualitas tidak akan lenyap, jadi kesatuan antar manusia (termasuk juga

masyarakat) adalah berdasarkan perjuangan terus menerus. Kesatuan dan persatuan manusia tak pernah selesai; harus berlangsung terus menerus selamanya. (Driyakara, 1969).

Islam memandang manusia secara holistik, menyeluruh. Di satu pihak digambarkan pentingnya hubungan vertikal antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai Pencipta; di pihak lain digambarkan pula hubungan horizontal yakni, antara sesama manusia (QS.3 : 112). Hubungan vertikal meletakkan kedudukan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan (QS.2 : 122), sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi (QS.2 : 30), serta sebagai makhluk semi-samawi dan semi-duniawi (QS.32 : 7-9). Di dalam diri manusia tertanam sifat mengakui adanya Tuhan (QS.7 : 172; QS.30 : 43) sebagai implikasi keterbatasan dan ketakberdayaan manusia di alam semesta. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih (QS.33 : 72; QS.76 : 2-3), namun manusia juga memiliki rasa tanggungjawab moral, karena manusia telah dianugerahi kemampuan untuk membedakan antara yang haq dan yang bathil (QS. 91 : 7-8; QS.23 : 115).

Hubungan horisontal, yakni antar sesama merupakan cerminan kerjasama dalam perbuatan yang baik, bukan kerjasama dalam keburukan dan permusuhan (QS.5 : 2); kecintaan kepada sesama manusia setara dengan kecintaan kepada dirinya sendiri (Hadits); menanamkan rasa kasih sayang dalam kekeluargaan (QS.42 : 27; HR. Muslim); memenuhi hak sesama muslim berupa: menjawab salam, membesarkan hati orang yang sedang sakit, mendatangi undangan, melayat (ta'ziyah), mendoakan orang bersin

(HR. Muslim).

Hubungan "Aku-Engkau"

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antar manusia; antar subjek, berakar pada hubungan antara "Aku" dan "Yang lain". Menurut Martin Buber, manusia mempunyai dua relasi yang berbeda secara fundamental. Di satu pihak relasi dengan benda-benda dan di lain pihak relasi dengan sesama manusia dan Allah.

Yang dimaksud dengan hubungan "Aku-Engkau" adalah hubungan antar dua pribadi. jadi "Aku" menghadapi seorang manusia sebagai "Engkau" bagiku, dan memperlakukannya sebagai "Engkau", ia tidak lagi sebagai benda di antara benda-benda, dan tidak tersusun dari benda-benda. Sesèorang itu bukan merupakan dia yang terkait dengan dia yang lain dan bukan sebagai hal khusus dalam ruang dan waktu yang terjalin dalam jaringan dunia, dan bukan merupakan suatu benda alam yang dapat dialami dan digambarkan, dan bukan suatu kumpulan dari sifat-sifat. Tanpa ikatan dengan yang lain, segalanya berada dalam sinar cahayanya (Martin Buber, 1985).

Relasi "Aku-Engkau" menandai hubungan antar pribadi (Beziehung), di mana "Aku" menyapa "Engkau" dan "Engkau" menyapa "Aku" tidak menggunakan "Engkau", tetapi "Aku" menjumpai "Engkau". Dalam pertemuan ini "Engkau" tidak mungkin didapatkan dengan mencari, tetapi "Engkau" tampil bagi saya sebagai suatu rahmat. "Engkau" menemui "Aku". Dan meskipun pengungkapan kata "Engkau" adalah sungguh-sungguh tindakanku, namun ini merupakan hubungan langsung tanpa dicari-cari. Hubungan ini berarti dipilih

dan memilih, antara pasip dan aktif menjadi satu. Kata "Aku-Engkau" hanya dapat dikatakan dengan keseluruhan yang ada. Pemusatan dan peleburan dalam keseluruhan yang ada tidak akan terjadi hanya dengan tindakanku, dan juga tidak akan terjadi tanpa "Aku" (Ibid).

Selanjutnya dikatakan bahwa berada adalah berada dalam hubungan, segala yang ada dalam dunia ini berada dengan yang lain-lainnya. Orang yang mengungkapkan kata "Aku-Engkau" dengan seluruh keberadaannya dan dalam artinya yang menyeluruh, masuk ke dalam suatu hubungan antar pribadi dan merealisasikan "Engkau yang ada dalam dirinya". Dengan seluruh keberadaannya berarti bertindak dengan segala kekuatan jiwanya, dan tanpa mengandung pertentangan dan kontradiksi. Tetapi manusia hanya dapat menjadi keseluruhan dengan memasuki hubungan dengan diri yang lain, semua kehidupan dan keberadaan yang nyata, semua kehadiran yang benar, ditemukan dalam suasana hubungan "Aku-Engkau" (James Mundachal, 1977).

Pada prinsipnya kehidupan nyata merupakan kumpulan dari hubungan personal yang akrab. Jembatan penghubung antara dua kutub "Aku dan Engkau" tidak hanya terdiri dari perasaan dan pemahaman. Tindakan ini mencakup segala fungsi jiwa dan ini merupakan tindakan yang paling luas dan sekaligus menjadi pusat. Tindakan ini menggabungkan dua pusat kepribadian yang berkedudukan satu sama lain. Yang lain menjadi "Engkau" bagi yang lain, yaitu "Engkau" adalah merupakan gerakan dasar dalam diri manusia (Ibid). Dengan demikian hubungan "Aku-Engkau" dalam keharmonisan menjadi sangat penting

dalam hubungan antar manusia.

Pikiran yang senada tentang "Aku-Engkau" ditemukan dalam pemikiran eksistensialis Gabriel Marcel yang dikemukakan lewat pengertian "Cinta-kasih" (Tomy F. Awuy, 1993). Pandangan Marcel tentang hubungan "Aku-Engkau" diangkat dari perbedaan antara "Masalah" (problem) dan "Misteri" perbedaan "Masalah" dan "Misteri" itu mempunyai akarnya didalam jenis datun yang digeluti "Masalah" adalah, penyelidikan yang dimulai dalam kaitannya dengan objek. Sedangkan "misteri" adalah persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari subjek itu sendiri. Misalnya misteri mengenai: Apakah "Aku" itu ? Ini merupakan misteri, sebab "Saya" terlibat didalam "Aku" itu, artinya sebagai datun mencakup "saya" juga.

Persoalan-persoalan seperti "Apakah aku itu ? bagaimana" relasi-ku dengan "Engkau" merupakan misteri yang menjadi kajian penting dalam filsafat Marcel. Menurut Marcel hubungan eksistensi antara "Aku dan Engkau" merupakan keterjalinan cinta-kasih yang menuju keabadian. Dalam hubungan keduanya menjadi "subjek-objek" artinya yang satu ingin menguasai yang lain. Tetapi hal ini tidak akan terjadi begitu saja, sebab di dalam "Aku" terdapat sesuatu yang sifatnya mutlak, yang datang dari luar dirinya dan yang mutlak itu mengasihinya secara mutlak pula. Disini keterbatasan manusia dapat diatasi, apabila hubungan "Aku-Engkau" terjalin berdasarkan cinta-kasih yang mutlak, yaitu cinta-kasih Tuhan (Tomy F. Awuy, 1993).

Marcel memahami Allah sebagai "Engkau Absolut". bagi Marcel, Allah adalah seorang Pribadi transendent yang menjadi dasar metafisis dan terdalam dari

setiap persekutuan antar manusia. (Mathias Hariadi, 1990). Transendensi demikian mau mengembalikan kedudukan seorang pribadi dari hanya sekedar "Objek" menjadi "Subjek" yang personal dan unik.

Apabila kita bandingkan pandangan antara Buber dan Marcel ada beberapa prinsip dasar yang hampir sama. Kalau Buber mengawali pembahasannya mengenai intersubjektivitas memakai dua pasangan kata yaitu Ich-Du ("Aku-Engkau") dan pasangan Ich-Es ("Aku-Itu") sedangkan Marcel bertitik tolak dari "Esse est co-esse" (ada berarti ada bersama) kedua filsuf memandang bahwa hubungan intersubjektivitas ("Aku-Engkau") harus memiliki dasar metafisis yang memungkinkan relasi itu.

Dalam kaitannya dengan Pancasila hubungan intersubjektivitas yang terjadi antara relasi dalam komunitas dengan ke Indonesiaan harus memiliki prinsip metafisis yang menjadi referensi (prinsip) terjadinya relasi itu. Selanjutnya akan diuraikan hubungan "Aku-Engkau" dalam perspektif Pancasila.

Hubungan "Aku-Engkau" dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pengarah dan pengisi tata kehidupan bangsa, menempatkan individu dalam posisi yang tidak berdiri sendiri artinya keindividuan itu lebih diutamakan dalam rangka kesosialannya. Namun itu tidak berarti bahwa individu itu terlepas sama sekali dari sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan artinya antara Tuhan, manusia dan dunia infra human memiliki keterhubungan yang tidak dapat disangkal lagi. Keterkaitan antara Tuhan, manusia

dan dunia infra human adalah hakekat Tuhan sebagai penyebab awal yang dari padanya tergantung segala sesuatu Maha Sempurna dan Maha Kuasa.

Dalam hubungan antara manusia dan infra human dikatakan bahwa manusia dan dunia infra human saling mempengaruhi secara mendalam, tanpa membatalkan kemandirian mereka dan relasi pribadi mereka. Akan tetapi baik manusia maupun substansi infra human bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan terhadap Tuhan Pencipta alam semesta dengan segala isinya. Hubungan "Aku-Engkau" yang masing-masing mempunyai otonomi dan kesadaran berelasi sadar betul akan kesamaan kedudukan kodrat kita serta kesamaan sifat kodrat kita. Hubungan "Aku-Engkau" harus dikembangkan dalam rangka mementingkan kedudukan dan sifat kesamaan dan kesatuan kita bersama, dimana perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan yang ada harus dijauhkan. Perbedaan yang ada harus disadari sebagai bagian dinamika kebudayaan sebagai suatu rahmat Tuhan, yang pada gilirannya harus dikembangkan dalam suatu kesadaran spiritual untuk beramal shaleh bagi dirinya dan orang lain serta bagi bangsa.

Kesadaran spiritual untuk beramal shaleh bagi kepentingan Nasional dapat kita saksikan pada sikap warga negara Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap saudaranya sebangsa dan setanah air di Flores ketika ditimpa musibah gempa bumi 12 Desember 1992 yang lalu. Hal itu tampak dari sumbangan yang mengalir baik lewat dompet Bencana Alam yang dibuka hampir di semua surat kabar, lewat Menteri Sosial, lewat kelompok-kelompok yang

langsung pergi ke tempat bencana. Menurut PJ. Suwarno dalam tulisannya di Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5 Januari 1993, dinilai bahwa sikap tersebut merupakan perwujudan semangat nasionalisme Indonesia. Dikatakan bahwa bangsa adalah sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu. Bagi bangsa Indonesia faktor pendorong pertama yang menimbulkan keinginan bersama untuk bersatu itu ialah penderitaan yang ditimpakan oleh penjajah. Rupanya penderitaan ini masih selalu menggetarkan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk menggalang solidaritas yang menimbulkan persatuan secara nasional. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau bencana alam tersebut yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional mampu membangkitkan solidaritas sosial yang begitu besar. Mungkin Bencana Nasional Flores 12 Desember 1992 itu dapat dijadikan momentum penting untuk menggalang Kebangkitan Nasional II yang berwajah kemanusiaan sebagai sublimasi dari Revolusi Nasional 1945 yang berwajah pembangkangan terhadap penjajahan yang menyebarkan penderitaan. Dengan terjadinya Bencana Nasional Flores itu, kita mendapat sedikit gambaran sejauh mana kemampuan material Nasional yang dapat dihimpun untuk menanggulangi Bencana Nasional. Gambaran ini tentu dapat dimanfaatkan untuk menggariskan kebijaksanaan yang mengacu ke arah upaya untuk merangsang kebangkitan nasional dengan dasar nasionalisme yang berdimensi sosial ketimbang dimensi politik pemerintahan. Artinya kita menumbuhkan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap

mempertahankan persatuan itu dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia yang masih miskin dan masih ada dibawah garis kemiskinan. Dalam memerangi kemiskinan kita harus menguasai persenjataan yang berupa IPTEK, yang tidak dapat dibeli hanya dengan uang tapi harus direbut dengan ketekunan bertahun-tahun oleh pemuda-pemuda yang mempunyai tekad membaja. Kecuali itu pelaku-pelaku ekonomi yang pada perjuangan periode 1966 - 1992 sudah menjadi kuat dan konglomerat harus ada keberanian mengorbankan kepentingan pribadi untuk mengangkat pelaku-pelaku ekonomi yang masih tergolong lemah dan yang berada di bawah garis kemiskinan. Di sinilah solidaritas sosial yang harus diwujudkan sekuat solidaritas yang kini diejawantahkan oleh solidaritas sosial terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa bencana alam di Flores. (Suwarno, 1993).

Dengan mengamati fenomena solidaritas sosial yang berskala Nasional itu kita dapat melihat fungsionalisasi hubungan "Aku-Engkau" yang mentransendent mengatasi dan menerjang dinding-dinding mencari sisi-sisi dari ajaran agamanya yang telah mengamanatkan tindakan solidaritas yang berwajah kemanusiaan untuk mengatasi penderitaan sesamanya. Melalui semangat ini persatuan nasional yang dijiwai oleh Pancasila berkembang tanpa hambatan faktor-faktor primordial bahkan solidaritas tersebut harus dilestarikan pada momentum-momentum lain pada situasi aman.

Penutup/Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Globalisasi informasi melalui kemajuan dan pemanfaatan teknologi akan mempengaruhi bangsa Indonesia sebagai bagian dari satu tatanan global terutama pada aspek sosial budaya.
2. Perubahan Sosial itu mengakibatkan perubahan berbagai instrumen dalam kehidupan manusia berupa perombakan infra struktur sosio kultural masyarakat sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, tingkah laku setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Pengaruh terhadap pola pikir itu berbentuk kerenggangan/ketidakharmonisan hubungan individu satu dengan yang lain. Keharmonisan hubungan "Aku-Engkau" menjadi terganggu. Orientasi individualistik dan materialistik dalam perkembangannya merubah keutuhan dan keharmonisan hubungan "Aku-Engkau" sehingga "Aku" menganggap "Engkau" bukan "Engkau" secara hakiki dalam keutuhan, tetapi "Engkau" sebagai "Itu" (dalam istilah Jawa: "Ora Nguwongake"). Sikap demikian sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan.
4. Untuk menghindari dan mengeliminasi pengaruh negatif itu maka perlu dikembangkan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terwujud dalam etos kebudayaan.
5. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan secara kreatif-inovatif dan melepaskan diri dari sikap jumud, keterkungkungan secara dogmatis. Pengembangan nilai-nilai Pancasila

tidak hanya berhenti pada domain kognitif tetapi harus sampai kepada domain afektif dan psikomotorik berupa sikap keteladanan yang dilandasi moral dan akhlak.

6. Prinsip hubungan intersubjektivitas Pancasila dikembangkan dari prinsip pengakuan Pancasila terhadap otonomi individu dan kebersamaan, yang disinari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Dengan demikian suasana hubungan intersubjektivitas itu akan menjamin suasana hidup yang lebih humanum dan religius.

Daftar Pustaka

- Buber, Martin, 1956, *The Knowledge of Man*, edited by Maurice Friedman, Unwin Ltd, London.
- _____, 1985, *I and Thou*, Charles Scribner's Sons Ltd, New York.
- Creel, H. 1985, *Alam Pikiran Cina sejak Confusius sampai Mao Zedong*, terjemahan Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Dagri, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 1978.
- Dibyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik dalam Simbol : Ontologi Mengenai Akar Simbol*, Disertasi Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
- Driyarkara, 1969, *Filsafat Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fuad Hasan, 1979, *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Harun Hadiwijono, 1979, *Sari Filsafat India*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Iskandar Alisyahbana, 1988, *Harapan dan Keprihatinan Kemajuan Teknologi Informasi Masa Depan*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Leahly, Louis, 1989, *Manusia Sebuah Misteri*, Gramedia, Jakarta.
- Mathias Hariadi, 1990, *Basis*, Edisi Agustus no.8, Yayasan Basis Yogyakarta.
- Mundackal, James, 1977, *The Dialogical Structure, of Personal Existence According to Martin Buber*, Always.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Sastrapratedja, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya* Dalam Oetoyo Oesman, (Ed), *"Pancasila sebagai Ideologi"*, BP7 Pusat Jakarta.
- Soerjanto, Poespowardojo, 1985, "Menuju kepada Manusia Seutuhnya" dalam *Sekitar Manusia: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*, Gramedia Jakarta.
- Soewarno. P.J. "Bencana Nasional dan Persatuan Nasional" *Kedaulatan Rakyat*, 5 Januari 1993.
- Titus, Smith & Nolan, 1984, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terjemahan : Rosyidi, Bulan Bintang, Jakarta.
- Tjie Tjay Ing, Su-Si, Lun Gi V, jilid XI:12.
- Tomy. F. Awuy, 1993, *Problem Filsafat Modern dan Dekonstruksi*, Lembaga Study Filsafat, Jakarta.